

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masa kini akuntansi merupakan hal yang paling melekat di berbagai kegiatan baik perusahaan maupun instansi pemerintah. Baik perusahaan maupun instansi menginginkan tujuan dalam suatu kegiatan yang telah direncanakan tercapai. Selain itu, untuk mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan yang direncanakan maka dibutuhkan suatu sistem yang dapat mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan tersebut.

Pemerintah baik daerah maupun pusat memiliki berbagai kegiatan setiap tahunnya, tidak terkecuali Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah Perjalanan Dinas Jabatan, Perjalanan dinas dalam hal ini adalah perjalanan dinas dalam negeri, yaitu perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Dalam melaksanakan kegiatan dibutuhkan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengatur kegiatan agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kegiatan perjalanan dinas sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas diperlukan biaya dan sarana agar kegiatan dapat terlaksana. Biaya yang digunakan untuk kegiatan perjalanan dinas telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja perjalanan dinas termasuk kedalam belanja barang sub belanja barang non-operasional. Belanja perjalanan dinas adalah berbagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perjalanan dinas sehubungan dengan tugas dan fungsi. Dalam mendapatkan dana untuk sebuah kegiatan dibutuhkan suatu prosedur yang bertujuan untuk mengatur penggunaan dana agar tidak disalah gunakan dalam sebuah kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah. Prosedur Pembayaran biaya perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang harus dipenuhi.

Terselenggaranya pemerintah yang baik merupakan prasyarat untuk setiap pemerintah dalam mewujudkan kinerja yang baik dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terstruktur sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan ini penulis tertarik untuk membahas laporan tugas akhir dengan judul “SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN”.





1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan apa saja yang terkait atas perjalanan dinas jabatan di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
2. Fungsi-fungsi apa saja yang terkait perjalanan dinas jabatan di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
3. Dokumen apa saja yang terkait perjalanan dinas jabatan di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
4. Bagaimana prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan-LS di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
5. Bagaimana prosedur pertanggung jawaban atas perjalanan dinas jabatan-LS di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?
6. Bagaimana pengendalian internal atas perjalanan dinas jabatan di kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menerangkan kebijakan-kebijakan perjalanan dinas jabatan
2. Menguraikan fungsi yang terkait perjalanan dinas jabatan
3. Menerangkan dokumen yang terkait perjalanan dinas jabatan
4. Menguraikan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan-LS
5. Menguraikan pertanggung jawaban perjalanan dinas jabatan -LS
6. Menerangkan pengendalian internal perjalanan dinas jabatan

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Akuntansi di Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dari informasi yang didapatkan terkait sistem perjalanan dinas.
2. Bagi Instansi
Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi masukan dan gambaran untuk instansi dalam mengevaluasi kebijakan dalam suatu sistem yang ada di instansi.
3. Bagi Pembaca
Diharapkan Laporan Tugas Akhir ini dapat menjadi sumber dan referensi pustaka untuk pembaca dalam mengembangkan suatu informasi, serta dapat mengetahui informasi mengenai sistem perjalanan dinas yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.